

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN: SEBUAH ALTERNATIF UNTUK MENGOPTIMALKAN CETAK BIRU PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 (SEKOLAH) MELALUI PENDEKATAN KOLABORATIF DI KAMPUNG MUKIM SINGKIR KEDAH MALAYSIA

***Rijalul Fikri¹, M Faisal Amrillah², Budi Mulianto³, Nur'Jila binti Mohammad⁴, Ryan Gusnaldi⁵**

^{1,3,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Islam Riau

² Program Studi Administrasi Bisnis, FISIPOL, Universitas Islam Riau

⁴ School of Government (SOG) at Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia

*Corresponding Author: rijalul.fikri@soc.uir.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pendekatan kolaboratif untuk memperkuat implementasi Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Sekolah) dengan berfokus pada pengembangan kapasitas pemerintah dalam kebijakan pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Malaysia. Kami menggunakan platform berbagi pengetahuan untuk membekali pejabat pemerintah dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam kebijakan pendidikan dengan pendekatan kolaboratif melalui TIK. Menciptakan lingkungan yang mendukung yang mendorong pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan sangatlah penting. Dengan memprioritaskan pengembangan kapasitas pemerintah dan mendorong kolaborasi, Malaysia dapat secara efektif mengimplementasikan cetak biru pendidikannya dan membuat kemajuan yang signifikan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan; Tata Kelola Kolaboratif; ICT

Abstract

This community service is a collaborative approach to strengthen the implementation of the Malaysian Education Blueprint 2013-2025 (School) by focusing on building government capacity in education policy. By involving various stakeholders, such as government agencies, educational institutions, communities, and civil society organizations, this approach aims to improve the quality and accessibility of education in Malaysia. We use knowledge sharing platforms to equip government officials with the necessary skills and knowledge in education policy with a collaborative approach through ICT. Creating an enabling environment that encourages continuous learning and innovation is critical. By prioritizing government capacity building and encouraging collaboration, Malaysia can effectively implement its education blueprint and make significant progress in providing quality education for the whole society. This community service was carried out in Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Keywords: Education Policy; Collaborative Governance; ICT

PENDAHULUAN

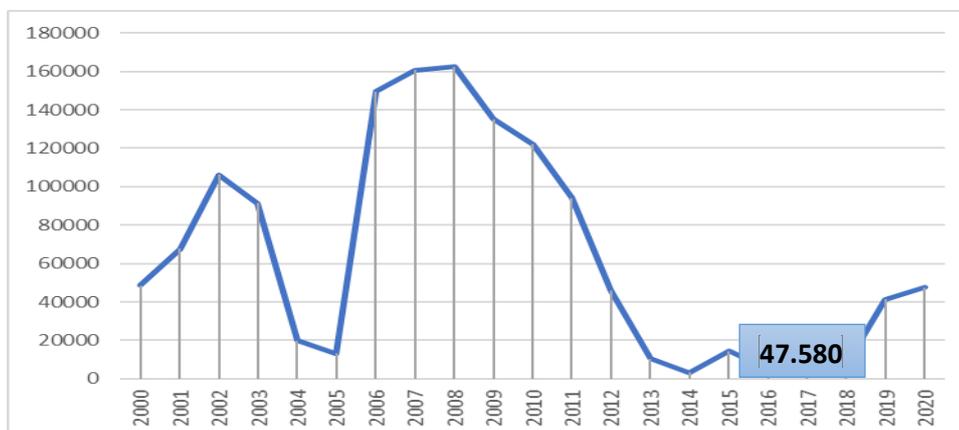
Di era globalisasi ini, negara-negara dituntut untuk menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam kebijakan pendidikan adalah kunci untuk menghadapi persaingan global dan menanggapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Pendidikan di Malaysia memiliki sistem yang terstruktur dan beragam, yang meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Kebijakan pendidikan di Malaysia didasarkan pada kerangka kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Salah satu kebijakan utama dalam sistem pendidikan di Malaysia dikenal sebagai Kebijakan Pendidikan Nasional (Mohd Yusoff, 2016) : pondasi ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, adil, dan inklusif bagi semua warga negara Malaysia. Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat keunggulan akademik, mempromosikan pendidikan multibahasa, meningkatkan kualitas guru, dan mendorong penerapan teknologi dalam pembelajaran (Ching, 2020)(Mohamad, 2020).

Pemerintah Malaysia memprioritaskan pendidikan prasekolah sebagai fondasi pendidikan awal yang penting. Program pendidikan prasekolah banyak disediakan untuk anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun dengan tujuan mempersiapkan mereka memasuki pendidikan dasar (Wong, 2020). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Malaysia mengacu pada "Kurikulum Standar Sekolah Rendah" (KSSR) untuk pendidikan dasar dan "Kurikulum Standar Sekolah Menengah" (KSSM) untuk pendidikan menengah. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran yang meliputi bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, seni, dan lain-lain (Bahrom (2020).

Untuk pendidikan tinggi, Malaysia memiliki sistem pendidikan tinggi yang luas, termasuk universitas, politeknik, akademi dan lembaga pendidikan tinggi lainnya (Ministry of Education Malaysia, 2015). Pemerintah Malaysia mempromosikan kualitas pendidikan tinggi dengan memperkuat penelitian dan inovasi, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memfasilitasi hubungan antara lembaga pendidikan tinggi dan industri.

Selain kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi tersebut, Pemerintah Malaysia juga mempromosikan pendidikan inklusif yang memberikan akses pendidikan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ministry of Education Malaysia, 2013). Program pendidikan inklusif dirancang untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang setara dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Government of Malaysia, 2017).



Gambar 1 Anak-anak yang tidak bersekolah, sekolah dasar di Malaysia
Sumber : WorldBank, 2023

Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pendidikan ini juga tidak membuat Malaysia terhindar dari problematika pendidikan, hal ini dapat dilihat dari angka putus sekolah tingkat dasar di Malaysia yang dari tahun 2018 semakin meningkat hingga pada tahun 2020 mencapai 47.580 anak yang putus sekolah di tingkat dasar (Lihat Gbr.1).

Masalah ini disebabkan karena pada tahun 2020, dunia termasuk Malaysia dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan hanya menyebabkan anak-anak kehilangan minat untuk bersekolah, 1 dari 4 orang tua merasa bahwa anak-anak mereka tidak tertarik untuk bersekolah (UNICEF, 2021).

Pada tahun 2021, 1.311 sekolah di seluruh negeri berada dalam kondisi yang tidak aman untuk belajar (A. Yunus, 2021). Selain itu, siswa di banyak bagian Malaysia masih berjuang untuk tiba dengan selamat di sekolah mereka. Banyak dari mereka harus menempuh jarak yang jauh, dan terkadang harus melewati jalan berlumpur. Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, perlu adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitasnya untuk mengoptimalkan kembali kebijakan pendidikan (A. Yunus, 2021). Untuk itu, tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana kerangka kerja kolaboratif dalam penataan kebijakan pendidikan di Malaysia khususnya di Negeri Kedah sebagai fokus dan objek dari kegiatan ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi inti permasalahan, tindak lanjut permasalahan, dan prioritas permasalahan dalam optimalisasi kebijakan pendidikan di Kedah Malaysia, maka tahapan pemecahan masalah yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

- Pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk identifikasi kebutuhan dasar, dimana tahap pertama kegiatan dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion untuk mengidentifikasi gambaran kebijakan pendidikan yang ada di Kedah Malaysia.
- Tahap Kedua, Tim Pengabdian akan melakukan sharing pengetahuan kepada masyarakat khususnya pemerintah atas hasil identifikasi kebijakan pendidikan yang ada di Kedah Malaysia.
- Tahap selanjutnya, setelah sosialisasi, tim akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemahaman pemerintah desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebijakan pendidikan yang ada di Kedah Malaysia.

Langkah kedua dengan melibatkan stakeholder mitra. Partisipasi mitra dalam hal ini adalah School of Government Universiti Utara Malaysia yang akan membantu tim untuk mengkoordinir masyarakat dan pemerintah di Kampung Mukim Singkir Distrik Yan Kedah Malaysia untuk hadir dalam FGD. Mitra program juga berpartisipasi dengan menyediakan tempat untuk melaksanakan program kemitraan termasuk perijinan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, mitra kegiatan turut serta dalam mempublikasikan program di kalangan masyarakat desa di wilayah pedesaan yang direncanakan.

Langkah ketiga, Tim melakukan evaluasi dalam tiga tahap yaitu evaluasi jangka pendek, jangka menengah, dan evaluasi akhir. Evaluasi jangka pendek dilakukan pada setiap selesainya kegiatan yang dilakukan dengan mitra terkait pelaksanaannya untuk dikoordinasikan bersama dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Evaluasi jangka menengah dilakukan oleh tim sejak awal kegiatan hingga empat bulan berlalunya program. Tim akan melakukan perbaikan dan perubahan metode jika evaluasi menilai kegiatan jauh dari tujuan yang direncanakan. Evaluasi akhir dilakukan oleh tim ketika program kemitraan masyarakat selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendala dan manfaat kegiatan yang diperoleh akan dilaporkan dalam laporan akhir untuk kesempurnaan pada kegiatan pengabdian selanjutnya. Untuk

keberlanjutan program, tim berkomitmen untuk melakukan pendampingan melalui penelitian bersama dengan UUM untuk uji coba konsep di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Kampung Mukim Singkir Distrik Yan Kedah Malaysia. Kegiatan dimulai dengan ceremony speech dari pihak Universitas Utara Malaysia, Universitas Islam Riau dan Perwakilan Masyarakat Kampung Mukim Singkir Distrik Yan Kedah Malaysia.



Gambar 2. Dokumentasi Pembukaan Kegiatan PkM 2023

Kegiatan dilanjutkan dengan proses penyampaian materi dan juga identifikasi terkait dengan permasalahan dari para siswa yang mengikuti kegiatan ini. Dalam materi ini dijelaskan mengenai Pendekatan yang digunakan dalam upaya pengembangan kapasitas pemerintah dalam kebijakan pendidikan dapat dilakukan melalui konsepsi tata kelola kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang mendukung TIK, serta konsepsi partisipasi dan keterlibatan. Konsepsi-konsepsi ini dapat dikombinasikan dengan kebijakan pendidikan yang dijelaskan dalam Rencana Pengembangan Pendidikan Malaysia.

Pemerintah di seluruh dunia menghadapi masalah yang kompleks, dan untuk menyelesaikannya diperlukan kerja sama antara lembaga pemerintah dan organisasi swasta untuk bekerja sama (Pardo, 2010). Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai "suatu proses atau serangkaian kegiatan di mana dua atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama" (Chun, 2012). Dalam konteks pemerintahan, Harrison et al (2012) mendefinisikan kolaborasi sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang untuk operasi pemerintah, kebijakan, atau keputusan tindakan kepada lebih dari satu kelompok pemangku kepentingan. Kolaborasi dapat terjadi di berbagai tingkatan dan dapat bersifat antar organisasi, lintas sektoral, atau melalui hubungan pemerintah-warga negara (Nam T, 2014)

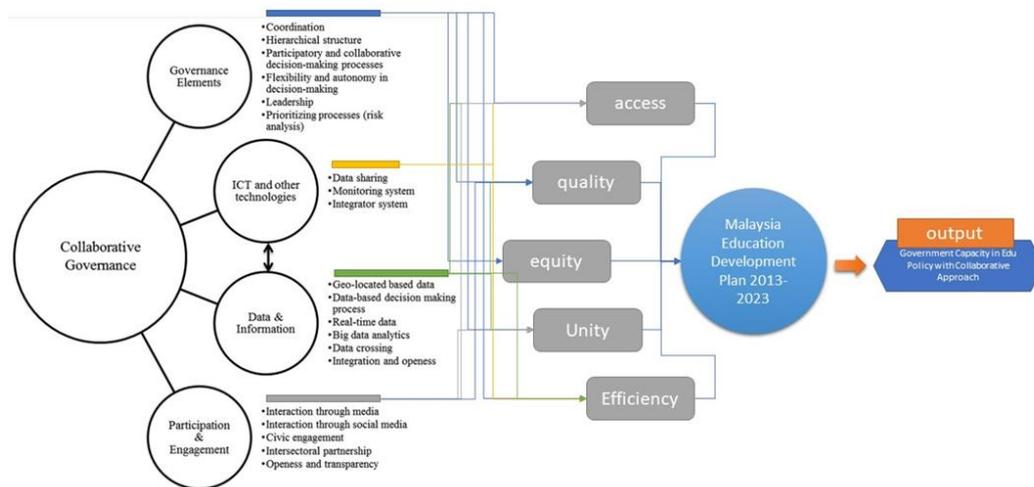
Kolaborasi internal, yang dapat dicirikan sebagai kolaborasi antar departemen atau antar lembaga (antar organisasi publik), dapat didefinisikan sebagai tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, dapat dengan mudah ditegaskan bahwa TIK memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi antar organisasi (Chun, 2012) dan pemerintah di seluruh dunia telah memprioritaskan peningkatan kolaborasi dan integrasi antar departemen pemerintah (Alhusban M, 2015).

Dalam kegiatan ini dijelaskan juga terkait dengan pada peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan model tata kelola, Charalabidis dkk (2012). Konteksnya adalah kombinasi penggunaan teknologi yang secara tradisional digunakan oleh pemerintah dan teknologi baru - media sosial, internet, data terbuka, alat analisis data besar, sensor warga negara, IoT, dan permainan. Interoperabilitas mendefinisikan kondisi yang diperlukan untuk kerja sama dengan bertukar informasi dan komunikasi antar organisasi. Selain itu, proses pengukuran, evaluasi kinerja, dan peningkatan juga diharapkan dapat dilakukan (Maheshwari, D, 2014).

Teknologi dapat menjadi komponen inti dari perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, namun dalam kasus lain, teknologi hanya merupakan aspek kecil. Elemen lain dari tata kelola pemerintahan yang cerdas mencakup koordinasi antara kebijakan ekonomi dan sosial, peningkatan koordinasi intra-pemerintah, desentralisasi, peningkatan partisipasi, dan reformasi struktur organisasi.

Tidak lupa, dijelaskan pula mengenai komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional selalu memberikan pendidikan terbaik untuk memastikan keberhasilan sumber daya manusia yang berkualitas (Ministry of Education Malaysia, 2013). Pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, memberikan ruang untuk inovasi, memperkuat institusi, sekaligus menumbuhkan kohesi sosial (World Bank Report, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Rencana Pengembangan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah menggariskan cita-cita yang ingin dicapai untuk mempertahankan kemajuan pendidikan dan menjadikan Malaysia sebagai negara berkembang (Ministry of Education Malaysia, 2013).

Melalui implementasi inisiatif di bawah Rencana Pengembangan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kementerian berharap untuk mencapai semua aspirasi yang direncanakan melalui lima aspirasi sistem, yaitu Akses, Kualitas, Ekuiti, Kesetaraan, Perpaduan, dan Kecekapan (Ministry of Education Malaysia, 2013) .



Gambar 3. Kerangka kerja ICT untuk memungkinkan tata kelola kolaboratif DAN Rencana Pengembangan Pendidikan Malaysia

Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat ini akan mencoba membantu menjelaskan bagaimana Kolaborasi Tata Kelola dengan TIK dapat dimaksimalkan untuk mendorong penguatan kebijakan Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kedah Malaysia. Hal ini diharapkan dapat memberikan berbagi pengetahuan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas mereka.



Gambar 4. Dokumentasi Diskusi Materi dalam Kegiatan PkM 2023

SIMPULAN

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam kebijakan pendidikan yang kolaboratif dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal. Pertama, Pemanfaatan ICT dapat meningkatkan efisiensi administratif pemerintah dalam mengelola kebijakan pendidikan. Sistem informasi terintegrasi dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data secara lebih cepat dan akurat. Kedua, Kebijakan pendidikan yang kolaboratif dengan dukungan ICT dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Platform pembelajaran online dan sumber daya digital dapat merentangkan jangkauan pendidikan ke wilayah yang sulit diakses atau terpencil.

Ketiga, ICT memungkinkan pengembangan konten pembelajaran yang interaktif dan relevan. Pendidik dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan manfaat keempat adalah Kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan ICT memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat. Ini dapat memperkuat kemitraan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dan penyelarasan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh tim pengabdian kepada masyarakat internasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dan khususnya kepada mitra pengabdian masyarakat internasional yaitu Schools Government Universiti Utara Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yunus. (2021). 1,311 unsafe schools in Malaysia, says Education Ministry. New Straits Times
- Alhusban, M. (2015). The practicality of public service integration. Electronic Journal of e-Government, 13(2), 94–109

- Baharom, M. N., & Abdul Rahman, S. (2020). Educational transformation in Malaysia: The challenges and way forward. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(2), 111-118
- Castelnovo, W., Misuraca, G., & Savoldelli, A. (2015). Smart cities governance the need for a holistic approach to assessing urban participatory policy making. *Social Science Computer Review*, 34(6), 724-739
- Charalabidis, Y., Kousouris, S., Lampathaki, F., & Misuraca, G. (2012). ICT for governance and policy modelling: Visionary directions and research paths. In *Empowering open and collaborative governance* (pp. 263-282). Heidelberg: Springer
- Chatfield, A. T., Reddick, C. G., & Brajawidagda, U. (2015). Government surveillance disclosures, bilateral trust and Indonesia-Australia cross-border security cooperation: Social network analysis of Twitter data. *Government Information Quarterly*, 32(2), 118-128
- Ching, C. H., Mohamed, N. S., & Halim, L. (2020). Development of education in Malaysia: Policies and challenges. In *Education and Social Change in Malaysia* (pp. 43-60). Springer
- Chun, S. A., Luna-Reyes, L. F., & Sandoval-Almazán, R. (2012). Collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 5-12.
- Cunha, M. A., Coelho, T. R., & Pozzebon, M. (2013). The use of ICT in public decision-making participation. In *Proceedings of the ECIS – 21st European Conference on Information Systems*, Utrecht, Netherlands
- Government of Malaysia. (2017). Eleventh Malaysia Plan 2016-2020. Retrieved from <https://www.epu.gov.my/en/rmke-11/eleventh-malaysia-plan-2016-2020>
- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., ... Pardo, T. (2012). Open government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective. *Information Polity*, 17(2), 83-97
- Maheshwari, D., & Janssen, M. (2014). Reconceptualizing measuring, benchmarking for improving interoperability in smart ecosystems: The effect of ubiquitous data and crowdsourcing. *Government Information Quarterly*, 31, S84-S92
- Ministry of Education Malaysia. (2015). Malaysia Education Blueprint 2013-2025 (Higher Education). Retrieved from <https://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Pelan%20Pembangunan%20Pendidikan%202013-2025.pdf>
- Ministry of Education Malaysia. (2013). Malaysia Education Blueprint 2013-2025 (Schools). Retrieved from <https://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Pelan%20Pembangunan%20Pendidikan%202013-2025.pdf>
- Mohamad, M., Abdul Ghani, A. M., & Yahaya, A. (2020). Strengthening school governance: A case study of Malaysian education policy. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 15(2), 135-150
- Mohd Yusoff, M. Y., Shaffril, H. A. M., Omar, Z., Hassan, S., & Ismail, I. A. (2016). The factors affecting the development of education policy in Malaysia: A review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(10), 452-461
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2014). The changing face of a city government: A case study of Philly311. *Government Information Quarterly*, 31, S1-S9
- Pardo, T. A., Gil-Garcia, J. R., & Luna-Reyes, L. F. (2010). Collaborative governance and crossboundary information sharing: Envisioning a networked and it-enabled public administration. In R. O'Leary, D. M. Van Slyke, & S. Kim (Eds.), *The future of public administration around the world: The Minnowbrook perspective* (pp. 129-139). Washington, DC: Georgetown University Press

- Reddick, C. G., Chatfield, A. T., & Jaramillo, P. A. (2015). Public opinion on National Security Agency surveillance programs: A multi-method approach. *Government Information Quarterly*, 32 (2), 129–141
- UNICEF Malaysia and UNFPA. (2021). Families on the edge: Issue 4
- Wong, S. L., & Chin, K. S. (2020). Towards quality education and educational reforms in Malaysia. In *Education and Social Change in Malaysia* (pp. 209-227). Springer

